

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Likuiditas

1. Pengertian Likuiditas

Dalam terminologi keuangan dan perbankan terdapat banyak pengertian mengenai likuiditas, beberapa diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/simpanan oleh deposan/nasabah. Dengan kata lain, menurut definisi ini suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari nasabah maupun dari para peminjam. Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Dari pengertian tersebut, bank dikatakan likuid apabila (Chairuddin, 2002):

1. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
2. Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhannya, tetapi bank memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas.
3. Bank tersebut memiliki likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, *call money*, atau penjualan dengan repo (*repurchase agreement*).

Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Selanjutnya berkaitan dengan masalah likuiditas ini, perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangannya dengan tepat waktu berarti perusahaan dalam keadaan liquid. Sebaliknya apabila perusahaan tidak segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo berarti perusahaan tersebut dalam keadaan inliquid. (Kuntadi, 2011)

Pengelolaan likuiditas juga merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional bank. Hal ini dikatakan kompleks karena likuiditas menyangkut dana pihak ketiga (DPK) yang sebagian besar dari sifat dana tersebut berupa jangka pendek dan tidak terduga. Oleh karenanya bank harus memperhatikan pengelolaan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu agar kebutuhan kewajiban perbankan dapat terpenuhi dengan baik.

Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio reabilitas. Apabila bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka bank tersebut dapat memicu munculnya risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka

pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain (Putra, 2010):

- a. Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana,
- b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana,
- c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas, dan
- d. Kemampuan menciptakan aset ke pasar bank atau sumber dana lainnya.

Apabila kesenjangan yang cukup besar terjadi, maka akan menurunkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik, karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil maka akan mengganggu kegiatan operasional bank. Namun demikian, likuiditas bank juga tidak boleh terlalu besar, karena apabila jumlah likuiditas terlalu besar maka akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas bank tersebut.

2. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Manajemen likuiditas juga melibatkan perkiraan sumber dana dan penyediaan kas secara terus menerus baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari manajemen likuiditas adalah (Siamat, 2005):

1. Untuk menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral.
2. Untuk mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan arus kas (cash flow), termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo.
3. Untuk sedapat mungkin memperkecil adanya dana kosong (idle funds).

Teori manajemen likuiditas pada dasarnya adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola dana dan sumber-sumber dana bank agar dapat memelihara posisi likuiditas dan memenuhi segala kebutuhan likuiditas dalam kegiatan operasional bank sehari-hari. Beberapa teori yang berkaitan mengenai manajemen likuiditas, antara lain:

a. Teori Pinjaman Komersial (*Commercial Loan Theory*)

Teori pinjaman komersial ini menitikberatkan pada sisi aktiva dari hal neraca bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Menurut teori ini likuiditas bank dapat terjamin apabila aktiva produktif bank yang terdiri dari kredit jangka pendek dicairkan dalam kegiatan usaha yang berjalan secara normal. Apabila bank akan memberikan kredit dengan jangka yang lebih panjang, hendaknya sumber dana diambil dari modal bank dan sumber dana jangka panjang. Bank hanya harus memberi kredit-kredit berjangka pendek, seperti kredit yang digunakan untuk modal usaha kerja untuk memproses suatu produksi yang bersifat sementara, misalnya pertanian. Sebelumnya, bank-bank menitikberatkan portofolio kreditnya sebagai sumber tambahan likuiditas hingga, karena saat itu

tidak banyak alternatif lain sebagai sumber likuiditas. Beberapa kelemahan dari teori ini, antara lain (Siamat, 2009):

1. Banyak kredit bukan jangka pendek
2. Dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, kredit modal kerja yang peluasannya berasal dari arus kas nasabah debitur akan menjadi tidak lancar.
3. Kredit jangka pendek dapat menjadi jangka panjang melalui perpanjangan waktu secara terus menerus.
4. Dalam perekonomian yang sedang maju, kredit jangka menengah atau panjang akan menjadi semakin penting dan dibutuhkan.
5. Teori ini mengabaikan pernyataan bahwa dalam keadaan normal atau stabil, sumber-sumber dana bank seperti dana pihak ketiga, kemungkinan untuk disalurkan sebagai kredit jangka panjang.
6. Secara implisit teori ini menganggap bahwa likuiditas dapat terpenuhi dengan hanya mengendalikan sumber dari peluasan dan atau pembayaran kredit oleh nasabah. Padahal penarikan dan pencairan kredit dapat melebihi likuiditas yang hanya bersumber dari peluasan kredit.

b. Doktrin Mengalihkan Aset (*Doctrine of Asset Shiftability*)

Akibat dari banyaknya kelemahan dari teori sebelumnya, muncullah teori *Doctrine of Asset Shiftability*. Di mana teori ini mengatakan bahwa bank dapat segera memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan memberikan *shiftable loan* atau *call loan*, yaitu pinjaman yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat-surat berharga. Pinjaman dapat melunasi pinjaman tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dengan

cara mengalihkan (*shifting*) pinjaman ke bank lain. Apabila alasan pinjaman tidak dapat dibayar, maka bank dapat menjual barang jaminan berupa surat berharga untuk pelunasan. Doktrin ini berfungsi apabila pasar keuangan sudah berkembang dan cukup aktif, dengan pengertian bahwa berapapun jumlah permintaan dan penawaran dapat diserap oleh pasar.

Tetapi teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu apabila dalam waktu yang bersamaan bank-bank membutuhkan likuiditas dan menjual jaminan surat berharga tersebut untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, dalam situasi ini bukan saja akan menyebabkan kredit tidak dapat dialihkan, tetapi juga akan menyebabkan turunnya harga surat berharga karena bank-bank menjual jaminannya dengan waktu yang bersamaan.

c. Teori Pengalihan Pasar (*Theory of Shiftability to The Market*)

Teori Pengalihan pasar ini mulai diperkenalkan akibat pesatnya penerbitan surat-surat berharga, terutama pada pemerintahan AS, misalnya treasury bills pada periode depresiasi dan beberapa lainnya yang selanjutnya menciptakan suatu pasar sekuritas yang terorganisasi dan berkembang secara baik. Teori ini juga berasumsi bahwa likuiditas suatu bank akan dapat terjamin apabila bank memiliki portofolio surat-surat berharga yang dapat segera dialihkan untuk memperoleh uang kas atau likuiditas.

Teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, yang antara lain pada saat sistem perbankan membutuhkan likuiditas dalam waktu yang bersamaan, dilakukan

dengan menjual sikuritas untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya sehingga dalam saat yang bersamaan bank-bank menjadi penjual sikuritas. Bagi negara yang memiliki bank sentral yang sudah berjalan dengan baik, situasi tersebut tidak menjadi masalah, karena bank sentral akan melakukan tindakan dengan membeli surat-surat berharga semua bank. Namun pada saat sistem bank sentral yang belum maju dan berjalan baik, maka hal ini akan menjadi masalah pada sistem perbankan di negara tersebut.

d. Teori Antisipasi Pendapatan (*The Anticipated Income Theory*)

Teori Antisipasi Pendapatan muncul dilatarbelakangi oleh rendahnya permohonan kredit kepada bank yang mengakibatkan terjadinya kelebihan likuiditas dan rendahnya keuntungan yang diperoleh bank, khususnya pada saat terjadi depresiasi ekonomi. Teori ini mendorong agar bank-bank agar lebih agresif dalam memberikan kredit yang berjangka panjang. Teori menyatakan bahwa bank-bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang, yang mana peluasannya, yaitu cicilan pokok pinjaman dan bunga dapat diharapkan dan dijadwalkan pembayarannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadwal pembayaran kembali nasabah akan memberikan cash flow secara teratur yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut.

Kelemahan dari *The Anticipated Income Theory* adalah menganggap semua kredit dapat ditagih sesuai waktu yang dijadwalkan, tanpa memberikan kemungkinan terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh debitur akibat faktor eksternal ataupun internal. Faktor eksternal dapat berupa resesi ekonomi yang

berkepanjangan, regulasi yang kurang mendukung, maupun bencana alam. Faktor internal dapat berupa mismanagemen atau kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan trampil. Teori ini dirasa sulit diharapkan sebagai sumber likuiditas musiman dan memenuhi kebutuhan permintaan kredit yang segera harus dipenuhi.

3. Ekses Likuiditas Perbankan

Ekses likuiditas merupakan jumlah cadangan bank yang didepositokan di bank sentral ditambah dengan uang kas yang disimpan untuk keperluan operasional harian bank (*cash in vaults*), dikurangi kebijakan Giro Wajib Minimum, (Saxegaard, 2006). Ekses likuiditas juga merupakan likuiditas yang digunakan bank untuk berjaga-jaga (*precautionary*), dan dapat dianggap sebagai perilaku optimisasi oleh bank. Munculnya ekses likuiditas di perbankan Indonesia dimulai ketika terjadinya krisis ekonomi pada 1997-1998 yang lalu. Ketika itu memburuknya kondisi perbankan nasional akibat besarnya kredit bermasalah dan turunnya kepercayaan masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, persistensi ekses likuiditas tersebut sering kali menimbulkan permasalahan bagi bank sentral selaku otoritas moneter.

Namun, tidak seluruh porsi ekses likuiditas memberikan dampak yang negatif bagi eektivitas mekanisme kebijakan moneter. Dalam porsi tertentu ekses likuiditas diperlukan sebagai penyangga bagi perbankan terhadap ketidakpastian panarikan dana oleh nasabah. Porsi ekses likuiditas ini dapat disebut juga sebagai ekses likuiditas untuk berjaga-jaga. Sedangkan, pada porsi lain ekses likuiditas

adalah likuiditas yang tidak diperlukan dan berpotensi memberikan efek negatif bagi efektivitas kebijakan moneter. Porsi eksekusi likuiditas ini disebut juga eksekusi likuiditas yang tidak terkendali (*involuntary*). (Bathaluddin, 2012)

Dalam konteks bank sentral, eksekusi likuiditas akan mengakibatkan berkurangnya efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter, terutama dalam mempengaruhi sisi permintaan dan mencapai sasaran inflasi. Karena itu selanjutnya akan mendorong bank sentral untuk menyerap melalui operasi moneter dalam bentuk lelang SBI maupun Fasbi agar tidak memberikan tekanan baik di pasar keuangan maupun perekonomian. Dampak eksekusi likuiditas bagi perekonomian dapat berupa keengganan perbankan untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit yang produktif karena memandang risiko yang masih tinggi di sektor riil, dan lebih memilih menempatkan dalam instrumen moneter. Akibatnya sumber dana di sektor riil menjadi terbatas yang akhirnya akan mengakibatkan harga menjadi mahal. (Bathaluddin, 2012)

Ada beberapa bahaya dari kelebihan dana pada suatu bank, yaitu :

1. Hilangnya kepercayaan memperoleh laba, karena tertahannya kas atau uang tunai.
2. Kurangnya kepercayaan pemilik dana atau nasabah karena turunnya penghasilan bank tersebut.
3. Rendahnya rentabilitas (kemampuan untuk memperoleh laba) pemilik dana menghambat perkembangan suatu bank.

Untuk menghilangkan pengaruh pengelolaan likuiditas agar tidak mengorbankan kepentingan rentabilitas, maka bank harus memiliki proyeksi atau rencana

kebutuhan likuiditasnya masing-masing. Proyeksi tersebut berdasarkan informasi dari unit-unit terkait, dan tidak berlaku untuk semua keadaan. Karena eksistensi likuiditas selalu berubah-ubah dan tidak pernah konstan pada setiap keadaan, baik dalam keadaan yang stabil, maupun dalam keadaan yang sedang krisis.

B. Teori Permintaan Uang Keynes

Permintaan uang adalah sejumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga dan tujuan spekulasi. (Sukirno, 2004)

1. Permintaan Uang untuk Transaksi

Memegang uang untuk membayar transaksi merupakan tujuan memegang uang yang paling penting. Di dalam perekonomian modern di mana tingkat spesialisasinya tinggi, uang sangat penting peranannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi atau jual beli. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terwujud apabila pertukaran dilakukan dengan menggunakan uang. Karena dengan ini orang dapat dengan mudah menggunakan uang untuk membeli apa yang mereka perlukan.

Tujuan meminta uang dengan motif transaksi ini juga timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang dengan tujuan transaksi ini dilakukan oleh besarnya tingkat pendapatan, yang artinya semakin besar tingkat pendapatan yang dihasilkan, maka jumlah uang yang diminta untuk transaksi juga mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah pendapatan yang

dihasilkan, maka jumlah uang yang diminta untuk transaksi juga mengalami penurunan.

2. Permintaan Uang untuk Berjaga-jaga

Disamping untuk membiayai transaksi, uang diminta pula untuk menghadapi keadaan kesusahan atau masalah penting lain di masa depan. Ada kalanya keadaan masa depan semakin bertambah baik, tetapi ada kalanya masalah-masalah buruk akan dihadapi. Untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama untuk menghadapi masalah kesusahan, sebagian uang disisihkan digunakan untuk menghadapi masalah di masa depan. Uang yang disisihkan untuk tujuan ini dinamakan permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga.

Besarnya permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan pula. Apabila semakin besar tingkat pendapatan, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin kecil tingkat pendapatan, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga pun semakin rendah. Ketidakpastian mengenai penerimaan dan pengeluaranlah yang menjadi pertimbangan untuk meningkatkan permintaan uang.

3. Penerimaan Uang untuk Spekulasi

Dalam ekonomi, di mana instisusi keuangan sudah berkembang, masyarakat menggunakan pula uangnya untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan lain-lain. Dalam menggunakan uang untuk tujuan spekulasi ini,

suku bunga atau deviden yang diperoleh dari memiliki surat-surat berharga tersebut sangat penting dalam menentukan besarnya jumlah permintaan uang. Apabila suku bunga atau deviden surat-surat berharga itu tinggi, masyarakat akan menggunakan uang untuk membeli surat-surat berharga tersebut. Akan tetapi apabila suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, mereka akan lebih suka menyimpan uangnya daripada membeli surat-surat berharga.

Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga mempunyai sifat yang berbeda dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang ditentukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga tinggi, permintaan uang untuk spekulasi adalah rendah oleh karena uang telah digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Sebaliknya, apabila tingkat bunga rendah, maka permintaan uang untuk spekulasi tinggi oleh karena masyarakat tidak bersedia melakukan pembelian surat-surat berharga dan akan memegang uang.

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa terdapat tiga motif permintaan uang. Namun, permintaan uang itu sendiri memiliki fungsi yang didapat dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya jumlah permintaan uang. Faktor-faktor tersebut berupa tingkat harga umum, pendapatan riil, dan suku bunga. Fungsi permintaan uang tersebut adalah sebagai berikut, (Abel, 2008):

$$M^d = P \times L(Y, i)$$

yang mana,

M^d : Permintaan terhadap Uang

P : Tingkat Harga Umum

Y : Pendapatan Riil

i : Suku Bunga

L : fungsi terkait permintaan uang terhadap pendapatan riil dan suku bunga nominal

Persamaan diatas menyatakan bahwa permintaan uang nominal, M^d sebanding dengan tingkat harga, P . Oleh karena itu, jika tingkat harga, P , ganda (dan pendapatan riil dan tingkat suku bunga tidak berubah), permintaan uang nominal, M^d , juga akan berlipat ganda. Hal ini mencerminkan fakta bahwa uang dua kali lebih banyak yang diperlukan untuk melakukan transaksi yang sama.

Persamaan ini juga menunjukkan bahwa, untuk setiap tingkat harga, P , permintaan uang tergantung (melalui fungsi L) pada pendapatan riil, Y , dan tingkat bunga nominal atas aset nonmoneter, i . Apabila terjadi peningkatan pada pendapatan riil, Y , maka akan meningkatkan permintaan untuk likuiditas dan dengan demikian meningkatkan permintaan uang. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada tingkat bunga. Kenaikan tingkat bunga nominal, i , akan membuat aset nonmoneter lebih menarik, dan ini akan berakibat berkurangnya permintaan uang. (Abel, 2008)

C. Tingkat Harga Umum

Indeks harga adalah rasio antara rata-rata harga sekelompok barang atau jasa pada suatu tanggal tertentu dengan rata-rata harga sekelompok barang atau jasa sejenis pada tanggal tertentu lainnya, yang disebut sebagai tahun dasar dengan indeks harga sebesar 100, indeks tersebut digunakan untuk menyatakan kembali jumlah yang berbasis harga perolehan pada laporan keuangan mengenai unit-unit daya beli pada tahun dasar atau pada akhir periode berjalan. Indeks harga ini dapat berupa indeks tingkat harga umum dan indeks tingkat harga khusus. Tingkat harga umum juga dapat dikatakan inflasi umum. Inflasi umum tersebut adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*. Di mana inflasi seluruh barang/jasa yang dimonitor harganya secara periodik. (Abel, 2008)

Tingkat harga umum merupakan tingkat harga yang mengalami kenaikan bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga barang secara umum. Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan yang penting kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi. Atau dapat dikatakan, kenaikan harga barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan akan menyebabkan inflasi. Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya

disebut deflasi. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian.

D. Pendapatan Riil

Dalam analisis makroekonomi istilah pendapatan nasional biasanya dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara.

Pendapatan nasional ini mewakili dari Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun Produk Nasional Bruto (PNB). Di samping itu ada pengertian lain dari pendapatan nasional, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. (Sukirno, 2004)

Terdapat dua konsep pendapatan nasional, pendapatan nasional pada harga berlaku dan pendapatan nasional pada harga tetap atau konstan. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun tertentu dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Konsep pendapatan nasional pada harga berlaku ini merupakan konsep yang selalu dilakukan dalam menghitung pendapatan nasional dari suatu periode ke periode lainnya.

Dapat diramalkan apabila dibandingkan data pendapatan nasional dari berbagai tahun, nilainya akan berbeda-beda dan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pertambahan nilai tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertambahan fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam

perekonomian dan kenaikan harga-harga yang berlaku dari suatu periode ke periode lainnya. Untuk dapat menghitung kenaikan tersebut dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada tingkat harga yang tetap. Pendapatan nasional pada harga tetap tersebut yang di maksud, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Nilai pendapatan nasional yang didapat dalam perhitungan secara ini dinamakan pendapatan nasional pada harga tetap atau dapat dikatakan juga pendapatan nasional riil. (Sukirno, 2004)

Pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Dalam memperbandingkan haruslah disadari bahwa perubahan nilai pendapatan nasional yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor, yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga. Adanya pengaruh dari faktor perubahan harga disebabkan oleh penilaian pendapatan nasional tersebut menurut harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Oleh karena perubahan nilai pendapatan nasional dari tahun ke tahun bukan saja disebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi tetapi juga oleh kenaikan harga-harga perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan nasional pada berbagai tahun

harus dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung pendapatan nasional menurut harga konstan.

Pendapatan nasional riil bisa ditentukan dengan cara mendeflasikan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku yaitu dengan menilainya kembali berdasarkan atas harga-harga pada tahun dasar tertentu (*base year*). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendeflasikan pendapatan nasional, salah satunya dengan cara yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen. Dengan menggunakan angka IHK ini pendapatan nasional riil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$Yr(t) = \frac{100}{IHK(t)} \times Yb(t)$$

Di mana, $Yr(t)$ adalah pendapatan nasional riil pada tahun t ; $Yb(t)$, adalah pendapatan nasional menurut harga yang berlaku pada tahun t ; $IHK(t)$, adalah indeks harga konsumen pada tahun t .

E. Suku Bunga

Suku bunga adalah biaya peminjaman atau harga yang harus dibayar untuk meminjam suatu pendanaan, biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun, (Miskhin, 2009). Tingkat bunga memegang peran penting dalam setiap perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat penyimpan nilai. Suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Harga atas penggunaan uang tersebut biasanya dinyatakan dalam persentase dalam jangka waktu tertentu.

Secara umum, naik turunnya tingkat bunga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan uang. Tingkat bunga naik apabila permintaan pinjaman atau debitur lebih besar daripada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur.

Sebaliknya, tingkat bunga cenderung turun bila permintaan debitur lebih kecil daripada jumlah uang yang ditawarkan oleh kreditur.

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan tingkat bunga.

Apabila tingkat bunga menjadi lebih rendah, lebih banyak usaha yang mempunyai tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga.

Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat dilakukan para pengusaha. Semakin rendah tingkat bunga semakin banyak investasi yang dilakukan para pengusaha. (Sukirno, 2004)

Ada beberapa teori-teori mengenai suku bunga, antara lain:

a. Teori Suku Bunga Klasik

Menurut kaum klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian yang menyebabkan tabungan yang tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama yang dilakukan oleh pengusaha. Beranjak dari teori ekonomi mikro, teori klasik

mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan nilai balas jasa dari modal. Dalam teori klasik, stok barang modal dicampuradukkan dengan uang dan keduanya dianggap mempunyai hubungan substitusi. Semakin langka modal, semakin tinggi suku bunga. Sebaliknya, semakin banyak modal semakin rendah tingkat suku bunga.

Investasi juga merupakan fungsi dari suku bunga. Makin tinggi suku bunga, keinginan masyarakat untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari suku bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut merupakan ongkos untuk penggunaan dana (*Cost of Capital*). Makin rendah suku bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil. Suku bunga dalam keadaan keseimbangan (artinya ada dorongan untuk naik atau turun), keinginan masyarakat untuk menabung akan sama dengan keinginan masyarakat untuk melakukan investasi. Misalnya terjadi kenaikan efisiensi produksi, maka akan mengakibatkan keuntungan yang diharapkan meningkat sehingga pada tingkat bunga yang sama para pengusaha bersedia membayar dana yang lebih besar untuk membiayai investasi, atau untuk dana investasi yang sama jumlahnya, para pengusaha bersedia membayar tingkat bunga yang lebih tinggi.

b. Teori Suku Bunga Keynes

Keynes mempunyai pandangan yang berbeda dengan klasik. Tingkat bunga itu merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh

penawaran dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dengan demikian akan mempengaruhi pendapatan. Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai full employment. Oleh karena itu, produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah tingkat upah maupun tingkat harga. Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi dapat dirangsang untuk meningkatkan produk nasional. Dengan demikian setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori keynes berperan untuk meningkatkan produk nasional.

Pertama, Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan bahwa ada suatu tingkat bunga yang normal. Jika memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik (harga turun) mereka akan menderita kerugian. Mereka akan menghindari kerugian ini dengan cara mengurangi surat berharga yang dipegangnya dan dengan sendirinya menambah uang yang dipegang.

Kedua, sehubungan dengan biaya memegang uang kas. Makin tinggi tingkat bunga, makin besar pula biaya memegang uang kas, sehingga keinginan memegang uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan akan uang kas naik. Dari kedua penjelasan di atas, dijelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga dengan permintaan akan uang tunai. Permintaan uang ini akan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga berada dalam keseimbangan apabila jumlah uang kas yang diminta sama dengan penawarannya.

c. Teori Suku Bunga Hicks

Hicks mengemukakan teorinya bahwa tingkat bunga berada dalam keseimbangan pada suatu perekonomian bila tingkat bunga ini memenuhi keseimbangan sektor moneter dan sektor riil. Pandangan ini merupakan gabungan dari pendapat klasik dan keynesian, di mana mazhab klasik mengatakan bahwa bunga timbul karena uang adalah produktif artinya bahwa bila seseorang memiliki dana maka mereka dapat menambah alat produksinya agar keuntungan yang diperoleh meningkat. Jadi uang dapat meningkatkan produktivitas sehingga orang ingin membayar bunga. Sedangkan menurut keynesian bahwa uang bisa produktif dengan metode spekulasi di pasar uang dengan kemungkinan memperoleh keuntungan, dan keuntungan inilah sehingga orang ingin membayar bunga.

Dari beberapa konsep tentang tingkat bunga, maka dapat kita hubungkan antara tingkat suku bunga tabungan dengan tingkat bunga kredit, di mana sektor perbankan menghimpun dana melalui giro, deposito dan tabungan lalu disalurkan melalui berbagai fasilitas kredit. Jelaslah bahwa penawaran kredit perbankan ditentukan oleh adanya akumulasi modal dalam bentuk deposito dan tabungan sebagai salah satu sumber dana perbankan dalam menyalurkan kredit.

Adanya tabungan masyarakat tidaklah berarti dana hilang dari peredaran, tetapi dipinjam/dipakai oleh pengusaha untuk membiayai investasi. Penabung mendapatkan bunga atas tabungannya, sedangkan pengusaha bersedia membayar bunga tersebut selama harapan keuntungan yang diperoleh dari investasi lebih besar dari bunga tersebut. Adanya kesamaan antara tabungan dengan investasi

adalah sebagai akibat bekerjanya mekanisme tingkat bunga. Besarnya tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank juga dipengaruhi oleh besarnya *Cost of Money*. Tingkat bunga kredit yang ditetapkan untuk seluruh nasabah harus lebih besar dari jumlah *Cost of Money* dan biaya operasionalnya.

F. Giro Wajib Minimum (GWM)

Menurut Pasal 1 PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Kebijakan pemberian jasa giro atau persentasi jasa giro dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia. Penentuan besarnya persentase jasa giro tersebut dilakukan dengan Surat Edar Bank Indonesia. Besarnya GWM sangat tergantung kepada persentase (Rasio GWM) yang ditetapkan oleh bank sentral. Semakin besar rasio GWM yang ditetapkan oleh bank sentral, maka semakin kecil daya ekspansi kredit bank umum.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, mengatakan bahwa bank wajib memenuhi GWM dalam bentuk rupiah dan valuta asing. GWM dalam rupiah bank umum harus memenuhi:

1. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah

2. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5 % dari DPK dalam rupiah, dan
3. GWM Loan Deposit Ratio (LDR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM Insentif.

Ketentuan mengenai GWM Primer dalam rupiah, GWM LDR dan GWM dalam valuta asing dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia, sedangkan GWM Sekunder dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk SBI, Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan atau Excess Reserve. Perhitungan GWM LDR dilakukan sebagai berikut:

1. Batas bawah LDR Target sebesar 78% dan batas atas LDR Target sebesar 100%
2. Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target memiliki GWM LDR sebesar 0%
3. Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR target diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Bawah (sebesar 0,1) dengan selisih LDR bank dari batas bawah LDR target.
4. Bank yang LDR-nya lebih dari batas atas LDR Target dan memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini 14%) akan diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian parameter disinsentif atas (saat ini sebesar 0,2) dengan selisih LDR bank dari batas atas LDR target.

5. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target dan memiliki KPMM sama atau lebih besar dari KPMM insentif (saat ini sebesar 14%), maka kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 0%
6. Besaran dan parameter LDR Target, KPMM Insentif, parameter disinsentif bawah, dan parameter disinsentif atas akan dievaluasi sewaktu waktu apabila diperlukan.

Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah. Bagian tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam rupiah. Jasa giro diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah. Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan memperoleh kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar 1% bagi pemenuhan GWM Primer dalam rupiah.

Terhadap Bank yang sedang dikenakan CDO (Cease and Desist Order) terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana, dalam rangka tindakan pengawasan Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan yang berbeda dari ketentuan GWM LDR sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 ini mencabut PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI

No. 10/25/PBI/2008, namun peraturan pelaksanaan dari PBI dimaksud tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini.

Ketentuan Giro Wajib Minimum diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas dalam perbankan. Bank dalam menghimpun dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total DPK yang dihimpun bank pada periode tertentu. Jumlah likuiditas wajib minimum tersebut harus ditetapkan dalam rekening giro bank yang bersangkutan pada bank sentral. Ketentuan dari Bank Indonesia, GWM dalam rupiah adalah 8% dari total DPK rupiah yang dihitung rata-rata harian dalam satu minggu dan harus dilaporkan ke BI.

Perhitungan GWM bagi analis luar menggunakan data keuangan bank yang dipublikasikan di media, sedangkan ketentuan dari BI bank wajib mempublikasikan laporan keuangan setiap triwulan (per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember). Perhitungan GWM ini adalah:

$$\text{Jumlah Saldo Giro pada BI} / \text{Jumlah DPK} \times 100\% = \geq 8\%$$

E. Tinjauan Empiris

Berbagai hasil-hasil penelitian yang relevan telah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Hasil penelitian tersebut telah dipelajari dan telah terangkum pada Tabel 2.1. Penelitian ini diambil dari beberapa sumber menggunakan sarana website, dan akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini. Referensi tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Beberapa penelitian yang terdahulu ini menjadi referensi bagi penelitian ini karena hasil dari penelitian-penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sebagai bahan tambahan untuk memperkuat terciptanya penelitian ini. Referensi dari penelitian terdahulu yang lain juga di pakai sebagai bahan acuan, tetapi dari referensi yang lain kelima penelitian inilah yang menjadi rujukan utama dari penelitian ini.

Penelitian terdahulu juga memberikan beberapa referensi berupa teori-teori dan model-model pada penelitian ini. Salah satunya pada penelitian yang dilakukan oleh Pierre-Richard Ageron, Joshua Aizenman, Alexander W. Hoffmaister (2004) menggambarkan model teoritis permintaan excess liquid reserves oleh bank komersial di mana terdapat risiko likuiditas dan volatilitas sektor riil, dan untuk mengelolanya bank komersial dapat memperoleh dana dari pasar uang antar bank atau dari bank sentral.

Diasumsikan bahwa bank menghimpun dana pihak ketiga (Deposit, D) yang bersifat endogen. Bank harus menentukan jumlah aset likuid yang tidak menghasilkan bunga, yang berupa cadangan (reserve, R) dan aset non-likuid yang menghasilkan bunga, yang berupa kredit (loan, L). Neraca dari bank komersial tersebut:

$$R + L = D \quad (2.1)$$

Cadangan atau reserve dibutuhkan oleh bank karena adanya risiko likuiditas.

Ketika aliran keluar (*net outflow*) dari DPK melebihi cadangan yang dimiliki bank, $u \geq R$, maka bank harus menanggung biaya likuiditas (liquidity cost) yang besarnya proposional terhadap jumlah kekurangan cadangan, $\max(0, u-R)$. Pada kondisi terjadi liquidity, bank harus meminjam kekurangan cadangan dengan menanggung

penalty rate (q), yang lebih besar dari bunga kredit, $q > r_L$. Keuntungan bank dapat dirumuskan sebagai berikut, dengan mendefinisikan r_D sebagai suku bunga tabungan (*deposit rate*):

$$\Pi = r_L L - r_D D - q \quad (2.2)$$

Dapat diasumsikan bahwa permintaan kredit dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga kredit dan proposional terhadap *expected output* (Y^e). Begitu juga dengan DPK, dipengaruhi secara positif oleh suku bunga deposito dan proposional terhadap *expected output*, dapat di lihat melalui persamaan 2.3 dan 2.4.

$$L = f(r_L) Y^e, f' < 0 \quad (2.3)$$

$$D = g(r_D) Y^e, g' > 0 \quad (2.4)$$

Diasumsikan pula bahwa L dan D ditentukan di permulaan periode, sebelum terjadinya *shock* terhadap output. Selain itu terdapat permintaan akan uang kas yang ditentukan di akhir periode, setelah terjadinya *shock* terhadap output dan likuiditas. Bank harus mempertahankan aset likuid (*liquid reserve*) yang proposional terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki dengan bunga sebesar r . Dengan mendefinisikan θ (*reserve requirement*) dan R (*total reserve*), maka Z (*excess reserve*) adalah:

$$Z = R - \theta D \quad (2.5)$$

Dengan mensubstitusi persamaan (2.5) dengan persamaan (2.1) maka diperoleh:

$$Z = (1 - \theta) D - L \quad (2.6)$$

Untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh konsumen yang tidak diantisipasi oleh bank, bank dapat meminjam dengan dikenakan biaya bunga sebesar q , dan selain itu dapat mengambil dari cadangan *excess reserve* (Z) miliknya. Dengan menggunakan persamaan (2.6), maka *expected reserve deficiency* adalah:

$$E \max [0, C - ((1-\theta) D - L)] \quad (2.7)$$

Berdasarkan persamaan (2.2), (2.3), (2.4), dan (2.7), maka dapat diambil persamaan profit yang diharapkan dari bank sebagai berikut:

$$\Pi = r_L L - r_D D - q$$

$$\Pi = [r_L f(r_L) - r_D g(r_D)] Y^e + rR - q E \max [0, C - ((1-\theta) D - L)] \quad (2.11)$$

Dengan mengasumsikan bahwa fungsi $f(\cdot)$ dan $g(\cdot)$ adalah fungsi quasi-concave, maka dapat dibuktikan preposisi berikut, (Agenor, 2004):

1. Peningkatan dari q (penalty rate), akan meningkatkan suku bunga deposito, suku bunga kredit dan kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank.
2. Peningkatan pada volatilitas dari output dan shock likuiditas memiliki efek yang ambigu terhadap suku bunga deposit, suku bunga kredit dan kelebihan cadangan. Apabila initial level dari *penalty rate* cukup tinggi, maka peningkatan volatilitas ini akan meningkatkan pula suku bunga deposito, suku bunga kredit dan kelebihan cadangan.
3. Peningkatan dari *reserve requirement rate* akan meningkatkan suku bunga kredit dan menurunkan *excess reserve*. Apabila tingkat volatilitas tidak terlalu tinggi, maka peningkatan *reserve requirement rate* ini juga akan menaikkan suku bunga deposito.

Bedasarkan 3 proporsi diatas, maka pada tingkat penalty rate yang cukup tinggi terdapat hubungan antara Z (*excess reserve*), q (penalty rate), θ (*reserve requirement*) dan volatilitas output dan shock likuiditas (σ) sebagai berikut:

$$Z = Z \begin{matrix} + & - & + \\ (q, \theta, \sigma) \end{matrix} \quad (2.12)$$

Dengan melakukan pemilihan ekses likuiditas menjadi ekses likuiditas yang bersifat berjaga-jaga atau tak terkendali akan memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai bagaimana dampaknya terhadap transmisi kebijakan moneter. Dalam ekses likuiditas yang bersifat tak terkendali cenderung akan keluar dengan cepat jika sisi permintaan agregat tumbuh lebih kuat, sehingga jumlah likuiditas dalam perekonomian akan meningkat dengan cepat tanpa melalui mekanisme penurunan suku bunga kebijakan ketika likuiditas justru seharusnya ditahan. Hal ini kemudian akan mengakibatkan terdorongnya meningkatnya risiko tekanan inflasi.

Lebih lanjut lagi, ketika bank memegang ekses likuiditas yang bersifat tak terkendali (involuntary) akibat perbankan tidak dapat menyalurkan kredit, maka upaya peningkatan permintaan kredit dengan cara menurunkan biaya pinjaman menjadi tidak efektif. Kebijakan moneter ekspansif justru akan meningkatkan excess reserve di bank dan tidak akan mendorong ekspansi kredit dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, pencegahan untuk ekses likuiditas dapat dilakukan untuk menjaga agar transmisi kebijakan moneter dapat dilakukan dengan baik. Untuk pencegahan tersebut, terlebih dahulu perlu mengetahui pengaruh dari terjadinya ekses likuiditas tersebut. Untuk itu penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan variabel tingkat harga umum, pendapatan riil, suku bunga dan giro wajib minimum.